

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK DI YOGYAKARTA

Meri Enita Puspita Sari

Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan Batam

Abstrak

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan pantas dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sudah selayaknya pula semua sektor wajib memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban-koraban tersebut sebagian besar adalah balita (anak dibawah lima tahun) dimana mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Untuk itu kita tidak boleh memandang sebelah mata permasalahan ini atau generasi penerus bangsa akan hilang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan Gizi Buruk di Yogyakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi penelitian Kualitatif. Sumber Data Yang digunakan yaitu data primer dari hasil Observasi dan Wawancara serta data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penanganan Gizi Buruk, peranan pemerintah meliputi Adapun 3 peranan utama pemerintah dalam Bidang Kesehatan, yaitu :

- a. Peran sebagai pembiaya (fasilitator) : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapt diakses oleh masyarakat miskin.
- b. Peran sebagai Pelaksana Pelayanan : pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.
- c. Peran sebagai Regulator : menjamin tersediannya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman / *patient safety*.

PENDAHULUAN

1. Peran Pemerintah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, banyak pulau besar dan kecil yang tersebar terpisahkan oleh lautan dan tidak mungkin pemerintah pusat untuk mengatur kesemuanya sehingga pembangunan wawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satu yang terakhir adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Birokrasi Pemerintah sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, dimana konsep ini sesungguhnya berhubungan dengan suatu kerangka dari tiga pihak. Didalam struktur tersebut, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang dapat disebut dengan birokrasi-birokrasi. Sedangkan fungsi-fungsi yang dikhususkan bagi mereka merupakan inti dari teori birokrasi Weber, yang dalam organisasi-organisasi dikenal sebagai administrasi.

Negara kita yang masih mengalami lonjakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi kendala dalam pewujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana masyarakat kecil tidak dapat membeli makanan pokok karena tidak mempunyai biaya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Keadaan hidup seperti ini semakin membuat mereka menjadi lebih terbatas dalam segala hal, sehingga mengalami kekurangan gizi. Ini disebut kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan faktor utama dari kekurangan gizi. Tingkat gizi masyarakat dapat menjadi tolak ukur dari kemajuan program pembangunan suatu Negara, karena itu program pemerataan perbaikan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan.

Dengan adanya otonomi daerah maka akan ada kebijakan desentralisasi daerah termasuk desentralisasi dibidang kesehatan, desentralisasi bidang kesehatan tersebut merupakan salah satu dari kebijakan kesehatan nasional, desentralisasi bidang kesehatan sebetulnya sudah disusun bulan januari 2001 tetapi sesuai dengan kebutuhan, maka kebijakan itu dikembangkan menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pusat dan daerah karena berbagai peraturan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan berbagai pedoman teknis memang belum semua ada. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan utama terhadap masyarakat harus memiliki kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini termasuk kebijakan pada bidang kesehatan.

Desentralisasi menyebabkan perubahan besar dalam tatanan pemerintah sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai kedaerah. Perubahan yang mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai kebutuhan daerah dan diselenggarakan secara efektif, efisien dan berkualitas.

Adapun peran birokrasi pemerintah adalah : *pertama*, Peran Provisi : Birokrasi sebagai organisasi pemerintah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan → melalui *budgeting policy* utk melaksanakan fungsi “alokasi”, Pemerintah menetapkan arah/haluan dan menyediakan fasilitas sehingga masyarakat bisa menyelenggarakan urusan publik secara otonom. *Kedua* , Peran Subsidi : Birokrasi sebagai organisasi pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan perataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsial dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan negara yang optimal, Dilakukan salah satunya melalui → subsidi, kebijakan pajak dan sosial, Birokrasi dalam hal ini memeran fungsi ‘distribusi’. *Ketiga*, Peran regulasi : Birokrasi sebagai organisasi pemerintah bertugas mewujudkan lingkungan sosial ekonomi dan politik yang kondusif dengan mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan melindungi kelompok yang lemah, melalui kewenangan regulasinya. Terkait dengan stabilisasi negara maka birokrasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan

sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Peran pokok pemerintah adalah menjaga *law and order* agar para pelaku dalam tata pemerintahan, khususnya pelaku ekonomi, atau pihak-pihak yang berpolitik dengan mengandalkan modal, bisa bersaing secara *fair*. Terkait dengan demokratisasi, birokrasi memiliki fungsi *subsidiarity*: Membawa proses pembuatan keputusan ke tingkat yang paling dekat dan paling relevan dengan persoalan. Tingkat atas hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di tingkat bawah. Kesemuanya ini harus ada kerangka regulasinya yang difasilitasi oleh birokrasi pemerintah. *Keempat*, Peran produksi : Selain peran provisi, subsidi, dan regulasi, birokrasi sebagai organisasi pemerintah memiliki fungsi produksi, ketika barang atau jasa untuk masyarakat tidak bisa/mampu dilakukan oleh stakeholders lain (swasta & masyarakat), dan posisi barang dan jasa tersebut sangat vital untuk kesejahteraan warga negara.

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan pantas dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sudah selayaknya pula semua sektor wajib memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban-korban tersebut sebagian besar adalah balita (anak dibawah lima tahun) dimana mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Untuk itu kita tidak boleh memandang sebelah mata permasalahan ini atau generasi penerus bangsa akan hilang.

Max Weber menjelaskan Birokrasi merupakan suatu badan administrative tentang pejabat yang diangkat. Birokrasi memiliki seperangkat karakteristik seperti ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan, keajengan (relibitas) yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain.

Dilihat dari permasalahan gizi buruk yang dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta maka diperlukan peran pemerintah didalamnya. Adapun 3 peranan utama pemerintah dalam Bidang Kesehatan, yaitu :

- d. Peran sebagai pembiaya (fasilitator) : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin.

- e. Peran sebagai Pelaksana Pelayanan : pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.
- f. Peran sebagai Regulator : menjamin tersediannya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman / *patient safety*.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan sebagai Birokrasi yang memiliki peran Regulator untuk melakukan pengawasan/ regulasi untuk menjamin bahwa lembaga penyedia pelayanan disuatu wilayah memberikan pelayanan yang bermutu, melaksanakan regulasi mutu penyedia pelayanan dan mempunyai surveyor yang handal, demi mencapai kepentingan nasional, penataan system informasi kesehatan kabupaten juga sangat penting artinya bagi kabupaten itu sendiri, yakni sebagai sarana penyedia indicator-indikator yang menunjukkan tercapai/tidaknya pembangunan kesehatan.

Dalam peran Dinas Kesehatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah khususnya Dinas Kesehatan adalah pemberi pelayanan kesehatan utama terhadap masyarakat, dimana pelayanan tersebut haruslah diberikan secara optimal, namun kenyataan yang ada pelayanan kesehatan yang ada di Yogyakarta terutama dalam menangani gizi buruk masih terhambat dengan kendala-kendala yang ada sehingga belum optimalnya penanganan gizi buruk di Yogyakarta dan artinya pemerintah masih gagal dalam menjalankan perannya.

2. Faktor-faktor Penyebab Gizi Buruk

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menaggulangi gizi buruk di Yogyakarta, sebaiknya kita mengetahui dulu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab gizi buruk, diantaranya adalah :

- a. Penyebab langsung yang terjadi akibat penyakit infeksi, tidak dapat dipungkiri lagi memang ada hubungan erat antara infeksi dengan malnutrisi, infeksi sekecil apapun berpengaruh pada tubuh, sedagakan kondisi malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada giliran berikutnya akan mempermudah masuknya beragam penyakit.
- b. Penyebab tidak langsung yang dipengaruhi oleh kemiskinan sebagai biang keladi munculnya penyakit ini di negara berkembang akibat rendahnya pendapatan

masyarakat sehingga kebutuhan pangan tidak dapat terpenuhi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak, laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan, kesalahan ibu dalam mengasuh anak karena ketidaktahuan Ibu dalam memberikan makanan yang bergizi dapat menyebabkan kekurangan gizi, gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan kelambatan kemampuan anak sehingga gampang diserang berbagai penyakit, dan yang terakhir adalah berat badan rendah yang dapat memicu banyaknya penyakit yang menyerang tubuh, karena tubuh sangat lemah dan kekebalan tubuh juga ikut lemah.

3. Penanggulangan Gizi Buruk Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Birokrasi Pemerintah yang memiliki peranan sebagai pemberi pelayanan prima terhadap masyarakat. Upaya untuk menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya mengatakan bahwa pertumbuhan itu adalah akibat dari perkembangan sosio ekonomi. Itu adalah akibat dari perkembangan yang semakin kompleks dari sesuatu masyarakat membuat permintaan jasa pelayanan semakin besar. Penjelasan lain menyatakan pertumbuhan itu didasarkan atas tekanan-tekanan ideologi dan politik. Tekanan dari sisi ini menghendaki agar Negara dan pemerintahan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menciptakan dan menambah bujet (Niskanen, 1971). Semakin besar bujet yang dipunyai oleh pemerintah, maka semakin besar pula peranan dan pertumbuhan pemerintah.

Dalam mengkaitkan pertumbuhan aktivitas pemerintahan dengan pengembangan kebijakan public (*public policy*) Richard Rose (1975) menjelaskan bahwa kebijakan public bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni merumuskan batas-batasnya, mobilisasi sumber, dan bermuara terkait erat dengan publik atau sosial. Pada umumnya perkembangan pemerintahan dalam masyarakat barat (*western society*) secara evolutif berjalan dari kategori menetapkan batas-batasnya menuju ke fungsi memobilisasi sumber-sumber dan fungsi publik atau masyarakat. Selanjutnya menurut Rose, pemerintah sekali telah menetapkan kekuasaan dalam tiga kategori tersebut, maka pemerintah tidak bakal

mengurangi atau menghilangkan kekuasaan tersebut. Disinilah pertumbuhan dan perkembangan semakin hari semakin besar.

Fakta bahwa pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif yang selalu menjadi bahan bahasan sejak dulu kala baik dalam berbagai tulisan maupun penelitian. Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif ini dipicu oleh berbagai hal yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistic, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward dalam birokrasi di Indonesia, lemahnya mekanisme *punishment* bagi aparat birokrasi, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsive, akuntabel dan transparan. Dimasa otonomi daerah yang member keleluasaan bagi setiap kabupaten atau kota untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kebutuhan dan kepentingan daerah sendiri ternyata juga belum mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif

Peran Pemerintah Kota dalam menanggulangi gizi buruk, yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan. Program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan dan terakhir peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk.

Dalam peran pemberdayaan, pemerintah bertugas untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang. Diantaranya (1) program penyuluhan gizi yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gizi, menanamkan sikap dan perilaku yang mendukung kebiasaan hidup sehat dengan makanan yang bermutu gizi seimbang. Penyuluhan gizi ini diberikan kepada kader gizi yang ada dikelurahan setempat dan masyarakat setempat. Penyuluhan gizi dilakukan minimal tiga kali dalam satu bulan, penyuluhan gizi dilakukakan dikelurahan dan dipuskesmas tiap kecamatan. (2) Program Pemberdayaan Keluarga sadar Gizi (KADARSI) yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota

Yogyakarta, masyarakat jadi mengetahui pentingnya makanan yang bergizi bagi tubuh dan selalu menggunakan garam beryodium. (3) Program Revitalisasi Posyandu bertujuan menggerakkan posyandu yang tidak berjalan agar kembali berjalan dan mengembangkan posyandu tersebut.

Dalam peran Pelayanan, dalam peran ini melibatkan dan menyangkut masyarakat banyak, tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besarnya imbalan yang mampu diberikannya. Dalam peran pelayanan ini, pemerintah mempunyai program-program untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat yaitu dengan program-programa, diantaranya : (1) Program Pemeriksaan Kesehatan dengan penimbangan berat badan serta konsultasi gizi, dengan begitu dapat diketahui status gizi anak. (2) Program pemberian Multivitamin untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak agar memiliki system kekebalan tubuh dan tidak terserang berbagai macam penyakit. (3) Program Pemberian Rujukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan fasilitas di puskesmas untuk dikirim ke rumah sakit sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan. (4) Program PMT (pemberian makanan tambahan) dimaksudkan untuk menambah pasokan gizi prima dan pangan yang kurang diberikan kepada anak oleh ibunya.

Dalam peran pengaturan, pemerintah membuat peraturan Perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Peran pengaturan disini yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah Walikota Yogyakarta No.181 tahun 2005, tentang fungsi dan tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pasal 14 serta mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 920/Menkes/SK/VII/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang klasifikasi status gizi anak dibawah lima tahun. Status gizi dibuat untuk mengukur suatu kondisi seseorang baik secara antropometri maupun klinik sebagai respon atas asupan makanan dalam jangka waktu tertentu. Status gizi ini dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan status gizi dapat kita ketahui apakah orang tersebut menderita kekurangan gizi, gizi buruk maupun gizi baik. Klasifikasi status gizi ini digunakan untuk mengetahui gizi anak dibawah lima tahun. Status gizi ini terdiri dari buku rujukan penilaian status gizi anak perempuan dan anak laki-laki menurut umur, berat badan dan tinggi badan.

4. Kendala Pemerintah Yogyakarta dalam Menanggulangi Gizi Buruk

Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sudah berusaha membuat program-program yang dapat membantu dalam menanggulangi gizi buruk, hanya masih saja ada kendala-kendala yang pasti menghambat program yang sudah dibuat pemerintah. Kendala yang dihadapi pemerintah kota Yogyakarta adalah bersifat multi faktor, yaitu karena pengetahuan ibu yang kurang, karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor dana. Faktor-faktor tersebut bukan hanya menjadi kendala dalam menanggulangi gizi buruk namun juga menghambat kebijakan kesehatan yang lain, dengan kata lain ini merupakan kendala-kendala umum yang ada dalam bidang kesehatan.

Untuk lebih jelasnya, disini akan dibahas kendala yang dihadapi Pemerintah kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Ibu yang kurang : pengetahuan Ibu yang kurang tentang gizi dan kesehatan dapat menjadi salah satu kendala dari penanggulangan gizi buruk. Sebagai Ibu rumah tangga harus dapat mengetahui apakah makanan tersebut bergizi atau tidak dan apakah makanan tersebut baik dikonsumsi atau tidak. Ibu juga harus bisa menjaga kebersihan makanan karena dengan kebersihan yang terjaga maka anak tidak mudah terjangkit penyakit. Seorang ibu juga harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya, harus mengetahui tanda-tanda balita sehat, karena dengan pengetahuan tersebut, maka ibu dapat melihat dan mengetahui kondisi anaknya.
- b. Faktor Ekonomi : faktor ekonomi inilah yang menjadi kendala utama dalam kasus penanggulangan gizi buruk. Masyarakat yang berkecukupan rendah tidak dapat mencukupi kebutuhan makan setiap hari. Mereka tidak dapat membeli makanan tambahan buat anak mereka, mereka hanya makan sekecukupan saja, seperti makan nasi putih (nasi yang sudah basi kemudian dijemur) karena harga beras yang mahal, sedangkan lauknya hanya tempe, terkadang pakai sayur dan ada juga yang makan nasi campur garam, sedangkan anak mereka hanya diberi minum teh atau air putih karena tidak mampu membeli susu. Kendala inilah yang menyebabkan banyaknya penderita gizi buruk dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Jika kemiskinan belum diberantas, maka masalah gizi akan terus tetap ada. Untuk

menanggulangi kemiskinan, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, agar angka pengangguran tidak semakin meningkat.

- c. Faktor Lingkungan : faktor lingkungan juga menjadi kendala dalam penanggulangan gizi, karena lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan banyak terjadinya penyakit, selain itu lingkungan yang tidak sehat juga membuat polusi udara. Anak jadi mudah terserang infeksi saluran pernapasan, infeksi lambung dan infeksi pencernaan. Lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat menyebabkan kekebalan tubuh anak menjadi lemah.
- d. Faktor Dana : dana dari pemerintah merupakan kendala pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk. Karena dana yang kurang tidak dapat memaksimalkan program yang telah ada. Anggaran dana untuk penanggulan gizi buruk hanya 0,1 % dari jumlah APBD, seharusnya total ideal penanggulangan gizi buruk dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar 0,3 % dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Jika dana tersebut ditambah, maka angka anak yang menderita gizi buruk atau gizi kurang akan menurun. Jika angka gizi buru meningkat, maka pemerintah tersebut dikatakan gagal dalam mensejahterakan tingkat kesehatan masyarakat.

Kendala-kendala yang ada diatas membuat kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menghargai hak dan martabat warga Negara sebagai penggunaan pelayanan tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintah dimata publiknya. Peranan pemerintah tidak berjalan dengan optimal dimana tingkat jumlah penderita gizi uruk meningkat, dapat dilihat dari penderita gizi buruk tahun 2005-2007 di tiap kecamatan di Yogyakarta.

Tabel 1
Jumlah Penderita Gizi Buruk di Tiap Kecamatan

NO	Kecamatan	Tahun		
		2005	2006	2007
1	Mantrijeron	33	28	38
2	Kraton	11	8	12
3	Mergangsan	14	18	10
4	Umbulharjo	44	47	16

5	Kotagede	13	32	13
6	Gondokusuman	13	13	16
7	Danurjan	14	7	5
8	Pakualaman	3	5	7
9	Gondomanan	15	10	4
10	Ngampilan	12	6	5
11	Wirobrajan	5	6	12
12	Gedong Tengen	8	21	25
13	Jetis	15	18	15
14	Tegalrejo	15	23	36
Jumlah		215	242	214

Sumber : Dinas Kesehatan Yogyakarta

Dengan adanya fenomena diatas, Pemerintah Kotamadya Yogyakarta berusaha untuk menanggulangi gizi buruk yang terjadi di Yogyakarta. Peran pemerintah kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk sangatlah penting. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan puskesmas-puskesmas namun tetap saja kendala selalu ada, disinilah bisa dilihat untuk memperbaiki gizi buruk tidak hanya pemerintah yang berperan namun juga kembali kemasyarakat sebagai yang diberi pelayanan, adanya saling kerjasama dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi Gizi Buruk di Yogyakarta.

Dengan kata lain, birokrasi belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga peranan pemerintah belum bisa berjalan dengan semestinya, sehingga dalam permasalahan ini, gizi buruk belum bisa ditangani dengan baik dan semestinya. Namn pemerintah sudah berusaha dengan baik agar peranan mereka berjalan. Namun dalam memberikan pelayanan public memang tidak mudah dalam mencapai sebuah tujuan yang sempurna, semua membutuhkan proses baik itu waktu, dana dan sistem birokrasi itu sendiri.

5. Kesimpulan / Saran

a. Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan diatas bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi buruk dalam peran pengaturan membuat kebijakan belum maksimal, karena masih banyak balita yang menderita gizi buruk dan kekurangan gizi dikota Yogyakarta karena dilihat dari tahun 2005-2007 penderita gizi buruk terus mengalami peningkatan di setiap kecamatan yang ada di Yogyakarta. Peranan Birokrasi Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan masih kurang cepat tanggap karena bantuan-bantuan dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas tidak bersifat terus menerus sehingga balita dan anak-anak tetap mangalami kurang gizi. Pemerintah memiliki peran sebagai Regulator tidak tercapai karena pelayanan yang diberikan belum mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Saran

Dengan melihat kendala-kendala yang ada sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat secara bertahap agar kesehatan masyarakat meningkat terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan sebaiknya anggaran dana untuk penanggulangan gizi buruk di tingkatkan lagi, agar balita gizi buruk tidak bertambah, serta pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan kerja, agar masyarakat tidak menganggur sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan P, dkk, 2005, *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*, Gava Media, Yogyakarta
- Albrow, Martin, “ Birokrasi” , Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005
- Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 920/Menkes/SK/VII/2002, tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun.
- Koirudin, “Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia”, Averroes Press, Malang. 2005.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 181 Tahun 2005, Tentang Penjabaran fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, “Birokrasi Politik Di Indonesia”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003.

UU No.32. Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.